

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terletak tepat di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Secara keseluruhan luas wilayah Indonesia mencapai 5.193.250 km<sup>2</sup> (kumparan, 2020). Dengan wilayah yang begitu luas, Indonesia memiliki berbagai keunggulan hasil sumber daya alam seperti hasil hutan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Sumber daya alam tersebut tentunya juga menjadi bagian dalam sumber mata pencaharian penduduk setempat. Pada tahun 2015, total populasi penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai 258,4 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2016). Berikut gambar posisi geografis negara Indonesia di peta. Sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Peta Negara Indonesia

(sumber: <https://www.suara.com/news/2020/12/21/081241/letak-geografis-indonesia-dan-keuntungannya?page=all>)

Dengan wilayah yang sangat luas serta populasi yang tergolong tidak sedikit, nyatanya Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan domestik seperti pembangunan. Permasalahan pembangunan yang terjadi di Indonesia diantaranya masalah dalam aspek pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan lainnya. Dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade terakhir angka kemiskinan di Indonesia masih berada di atas 10%. Seperti pada tahun 2009 total jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka persentase sebesar 14,15% atau dapat diperkirakan terdapat 32,53 juta jiwa

penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis angka kemiskinan. Pada tahun 2010 persentase kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 13.33% dengan total penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 31.02 juta jiwa. Sementara, pada tahun selanjutnya angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami kemerosotan mencapai 12,49 persen dan sebesar 30,02 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di tahun 2011 (Hairunnisa, 2020).

Disisi lain, sektor pendidikan yang juga merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu negara, juga dihadapi sejumlah persoalan lainnya. Permasalahan tersebut hadir dalam berbagai bentuk diantaranya seperti ketika rendahnya tingkat pendidikan yang tentu berpengaruh pada sektor-sektor lainnya seperti dapat mendorong peningkatan angka kemiskinan. Pendidikan di Indonesia masih tergolong mengalami sejumlah permasalahan karena adanya kesenjangan dalam sektor pendidikan itu sendiri. Infrastruktur lembaga pendidikan yang tidak layak, akses pendidikan yang belum merata, serta standar pendidikan wajib belajar yang belum terpenuhi sepenuhnya, merupakan contoh permasalahan pendidikan yang menjadi realita pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, permasalahan pembangunan lainnya di Indonesia datang dari pembangunan infrastruktur. Kendala tersebut di antara nya seperti sulitnya proses pembebasan lahan serta faktor lainnya yang menghambat proses pembangunan berbagai sektor infrastruktur di Indonesia seperti pembangunan kereta api, bandara, jalan raya, jalan tol dll. Berdasarkan data menurut *Global Competitiveness Report* tahun 2015-2016, Indonesia berada pada urutan ke-62 dari total 140 negara di dunia dalam pembangunan infrastruktur (Indonesia Investment, 2017). Hal tersebut diartikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masih berada di standar rata-rata pembangunan infrastruktur pada suatu negara.

Ketiga permasalahan tersebut tentu hanya menjadi sedikit gambaran dari berbagai permasalahan pembangunan yang hadir di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi sejumlah permasalahan pembangunan tersebut, Indonesia turut memanfaatkan dukungan eksternal berupa lembaga keuangan internasional untuk mendukung pembangunan mereka. Salah satu jalan yang digunakan Indonesia yakni, menjalin kerjasama bersama *Islamic Development Bank* (IsDB). IsDB merupakan organisasi internasional yang terbentuk tepat pada tahun 1975 (Farida, 2010). IsDB lahir dari organisasi induknya yakni, Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang juga merupakan organisasi internasional yang berfokus pada sejumlah permasalahan yang di hadapi oleh negara-negara dunia islam. Sejalan dengan organisasi induk nya, IsDB

merupakan lembaga keuangan multilateral yang secara khusus didirikan untuk menangani isu-isu permasalahan terkait pembangunan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam atau syariah di dalamnya. Landasan dan prinsip tersebut turut serta menjadi dasar pembeda IsDB dengan organisasi pembangunan internasional lainnya.

Dalam praktiknya IsDB berupaya mendorong terciptanya kualitas kehidupan dalam sektor sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat muslim di dunia. Adapun visi IsDB yakni menjadi pemimpin yang membantu perkembangan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat muslim yang tinggal baik di negara anggota ataupun bukan negara anggota. Sedangkan misi IsDB ialah mendukung pembangunan manusia secara komprehensif dengan tiga fokus utama yakni pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pengelolaan serta kesejahteraan masyarakat (Farida, 2010).

Sejak proses pembentukan hingga saat ini, tercatat ada 57 negara yang telah bergabung menjadi anggota IsDB. Negara-negara tersebut juga masuk dalam anggota organisasi induknya yakni OKI (Zaky, 2017). Seperti Indonesia salah satu contohnya, tidak hanya tergabung menjadi anggota OKI. Indonesia juga turut serta tergabung dalam keanggotaan IsDB. Indonesia sendiri merupakan satu diantara beberapa negara yang menjadi pengagas berdirinya IsDB sebagai sebuah Lembaga keuangan multilateral yang berfokus pada isu-isu pembangunan. Bagi Indonesia, IsDB merupakan organisasi internasional yang turut serta menjadi mitra penting untuk mendorong berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Dalam rangka merelisasikan hal tersebut, Indonesia turut serta menjalin kerjasama internasional bersama IsDB sebagai upaya mendorong penuntasan berbagai sektor permasalahan pembangunan di Indonesia diantaranya seperti, dalam sektor ekonomi, pengentasan kemiskinan, perkembangan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan lainnya.

Dalam rangka mendorong berbagai sektor pembangunan di Indonesia, IsDB hadir sebagai Lembaga kreditor multilateral yang memberikan pinjaman dana dalam bentuk pinjaman luar negeri untuk Indonesia. Kreditor multilateral sendiri, adalah suatu lembaga keuangan internasional yang diisi oleh beberapa negara sebagai anggota mereka. Berdasarkan data dalam buku laporan kinerja pelaksanaan pinjaman dana hibah luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Bappenas, pada paruh triwulan pertama Indonesia mendapat pinjaman luar negeri dari IsDB sebesar 6,2% berdasarkan data keseluruhan sumber pinjaman yang diperoleh oleh Indonesia. Pada paruh waktu tersebut dari keseluruhan kreditor multilateral yang hadir di

Indonesia, IsDB memiliki pencapaian kinerja tertinggi yang mencapai angka sebesar 13,5%. Selanjutnya pada paruh triwulan kedua, Indonesia menerima bantuan pinjaman luar negeri dari IsDB sebesar 5,9%. Paruh waktu triwulan ketiga, Indonesia menerima 5,7% dari IsDB (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2016).

Di tahun 2017, pada pembukaan triwulan pertama, Indonesia menerima pinjaman luar negeri dari IsDB sebesar 8,6%, dengan kinerja pelaksanaan tertinggi dari sumber kreditor multilateral yang mencapai 15,8%. Nilai tersebut tentu dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun 2016 dalam periode yang sama. Di paruh triwulan kedua, penerimaan yang diterima oleh Indonesia yang bersumber dari IsDB mencapai 8,8% dengan capaian kinerja yang masih masuk capai tertinggi dari kreditor multilateral dengan nilai 32,5%. Selanjutnya, di paruh waktu triwulan ketiga, pinjaman luar negeri yang diterima oleh Indonesia mencapai 8,7% dan Kembali mencapai capaian tertinggi dalam kreditor multilateral sebesar 48,5%. Dan pada triwulan keempat Indonesia menerima sebesar 8,2% pinjaman luar negeri oleh IsDB berdasarkan data keseluruhan sumber pinjaman dari aktor-aktor internasional untuk Indonesia. Paruh rentang waktu ini, mencapai kinerja pelaksanaan pembangunan di Indonesia oleh IsDB mencapai angka tertingginya yakni 76,6% dalam rentang seluruh periode dari tahun sebelumnya (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2017).

Berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun 2018. Nilai persentase pinjaman luar negeri yang diterima Indonesia dari IsDB mengalami penurunan dari rentang triwulan pertama hingga keempat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yakni, tahun 2017. Pada triwulan pertama, Indonesia menerima 7,6%. Selanjutnya, pada paruh waktu triwulan kedua, Indonesia menerima pinjaman dengan persentasi 6,1%. Disusul angka 5,1% pada triwulan ketiga. Namun, pada triwulan ketiga ini, Berdasarkan persentase keseluruhan pelaksanaan pinjaman luar negeri berdasarkan sumber pinjaman. Capaian kinerja yang dicapai pada pembangunan di Indonesia dengan bersumber pada IsDB mendapat capaian tertinggi sebesar 68,7% dari kreditor multilateral lainnya. Sementara itu, pada triwulan keempat persentase komposisi pinjaman luar negeri yang diterima oleh Indonesia dari IsDB mengalami penurunan dengan angka 4,8% (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2018).

Pada tahun 2019, angka persentase pinjaman luar negeri yang diterima oleh Indonesia dari IsDB memang dapat dikatakan belum meningkat begitu pesat dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam rentang waktu tahun ini, capaian kinerja yang dicapai dalam menjalankan proyek-proyek di Indonesia mencapai capaian tertinggi dibandingkan kreditor multilateral lainnya selama

rentang waktu dari triwulan pertama hingga terakhir. Pada triwulan pertama pinjaman luar negeri yang diterima Indonesia bersumber dari IsDB mencapai 6,3% dari total keseluruhan pinjaman luar negeri dari aktor-aktor internasional lainnya. Sementara capaian kinerja pelaksanaan mencapai 33,2%. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dari kreditor multilateral lainnya. Selanjutnya, pada triwulan kedua, Indonesia mendapatkan pinjaman luar negeri sebesar 6,1% dengan capaian kinerja pelaksanaan sebesar 70,3%. Triwulan ketiga, Indonesia memperoleh persentase pinjaman luar negeri yang mencapai angka 7,1% yang diiringi oleh capaian kinerja pelaksanaan proyek sebesar 178,4%. Terakhir, rentang waktu triwulan keempat, Indonesia memperoleh 6,8 persen pinjaman luar negeri dari IsDB dan capaian kinerja yang masih mencetak angka tertinggi, yakni 100,0% (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan pemaparan data dari buku laporan kinerja laporan kinerja pelaksanaan pinjaman dana hibah luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dalam rentang tahun 2016 hingga 2019, memang dapat dilihat bahwa dalam mendorong berbagai sektor pembangunan di Indonesia, IsDB sebagai kreditor multilateral turut serta berkontribusi di dalamnya. Meskipun data tersebut menunjukkan persentase yang tidak besar, tetapi dalam beberapa periode, kinerja pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang diterima oleh Indonesia dari IsDB, senantiasa menunjukkan angka yang tinggi atau bahwa masuk sebagai salah satu kreditor multilateral yang memiliki kinerja tertinggi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, muncul pertanyaan **Bagaimana strategi kerjasama Indonesia dan IsDB dalam mengoptimalkan sektor pembangunan di Indonesia tahun 2016-2020?**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab pertanyaan yang telah diuraikan diatas, penulis menggunakan kerangka dasar pemikiran, yang digunakan sebagai landasan teoritis yang sesuai dengan kasus atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis akan menggunakan Konsep Kerjasama Internasional dan Konsep Pembangunan.

## 1. Konsep kerjasama internasional

Konsep yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut adalah konsep kerjasama internasional. Kerjasama internasional terbentuk atas dasar berbagai masalah yang muncul dalam ruang lingkup nasional, regional, maupun global. Permasalahan tersebut seringkali tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Tetapi memerlukan kolaborasi lebih dari satu negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kerjasama internasional juga hadir atas dasar asumsi yang mengatakan bahwa setiap negara tidak mampu berdiri sendiri. Mereka memerlukan negara lain untuk menjalin hubungan dalam rangka memenuhi kepentingan mereka dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Menurut pendapat K. J Holsti konsep kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Suryandi, 2015).

Sedangkan menurut pendapat Dougherty James dan Pgaltzgraff dalam bukunya yang berjudul *Contending Theories of International Relations*, menjelaskan konsep kerjasama internasional sebagai berikut: “Kerjasama Internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Berbagai masalah tersebut telah membawa negara-negara didunia untuk membentuk suatu kerjasama internasional” (Dugis, 2016).

Pada hakikatnya kerjasama internasional hadir dalam tiga bentuk berdasarkan pada jumlah aktor yang terlibat, sebagai berikut:

### 1. Kerjasama Bilateral

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional mengungkapkan bahwa kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam mekanisme kerjasama internasional. Aktor utama yang terlibat dalam kerjasama yang berdasarkan pada hubungan bilateral itu ialah negara. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama bilateral mengacu pada kata bilateral yang berarti ada proses hubungan antara dua belah pihak atau dengan kata lain mencakup adanya interaksi antara dua pihak (Putri A. S., 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kerjasama bilateral mengacu pada jumlah aktor yang menjalin kerjasama, yakni kerjasama yang melibatkan dua pihak.

## 2. Kerjasama Regional

Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dijalin oleh beberapa aktor ataupun negara yang berada pada satu kawasan tertentu. Contohnya seperti kerjasama yang dijalin antar negara Kawasan Asia Tenggara dalam ASEAN ataupun kerjasama yang dijalin oleh negara-negara yang berada pada Kawasan Eropa dalam *European Economic Community* (EEC) (Anwar, 2021).

## 3. Kerjasama Multilateral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada kata multilateral yang berarti melibatkan lebih dari dua, dapat diartikan bahwa kerjasama multilateral ialah kerjasama yang dijalin oleh lebih dari dua aktor-aktor internasional. Menurut Jhon Ruggie multilateralisme diartikan sebagai suatu bentuk Lembaga atau institusi Internasional yang mengelola terjalannya hubungan antara tiga atau lebih dari dua aktor dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlaku secara umum (Choir, 2019).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk kerjasama internasional yang dijalin oleh Indonesia dan IsDB merupakan bentuk kerjasama bilateral dengan melibatkan dua aktor didalamnya yakni, Indonesia dan IsDB. Adapun konsep kerjasama internasional digunakan untuk dapat menjelaskan terkait apa bentuk strategi kerjasama yang digunakan oleh Indonesia dan IsDB dalam mendorong sektor pembangunan di

Indonesia, sebab dari pengertian konsep tersebut dapat dilihat bahwa kerjasama internasional terbentuk berdasarkan suatu permasalahan yang memang tidak dapat diselesaikan oleh suatu aktor internasional secara individual. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang dihadapi dengan menjalin kerjasama bersama IsDB. Strategi yang digunakan untuk mendorong sektor pembangunan dalam rentang tahun 2016-2020 di Indonesia ialah dengan melaksanakan program *Member Country Partnership Strategy* (MCPS).

MCPS merupakan model bisnis usaha pembiayaan yang ditawarkan oleh IsDB bersama dengan semua anggota Group-wide IsDB. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan pengembangan hasil Grup IsDB yang berdasarkan pada prioritas pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan sosial bagi masyarakat negara-negara anggota IsDB. Melalui program MCPS, IsDB menunjukkan kontribusi mereka dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan terutama permasalahan yang berkaitan dengan negara-negara anggota IsDB. Di dalam program MCPS, IsDB berupaya untuk mendorong kerjasama atau kemitraan yang menguntungkan bagi negara-negara anggota IsDB dengan meningkatkan transfer teknologi, investasi lintas batas negara, pertukaran segala hal yang berkaitan dengan perdagangan, serta berbagi pengalaman antara satu negara dengan negara lainnya (Susanti, 2017).

Kerjasama antara Indonesia dan IsDB dalam mekanisme program MCPS sejatinya sudah pernah dijalin pertama kali pada tahun 2011-2014. Pada masa tersebut, kerjasama kedua aktor merujuk pada program pembangunan yang sudah di rencana oleh Indonesia, sebab rencana pembangunan dalam program MCPS akan menyesuaikan rencana pembangunan yang sudah di prioritaskan oleh negara yang terlibat dalam mekanisme kerjasama tersebut. Merujuk pada kasus Indonesia kerjasama tersebut berdasarkan pada program pembangunan Indonesia yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Republik Indonesia. Berdasarkan program tersebut, kerja sama yang dijalin berfokus pada beberapa sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan dukungan pada pertanian dan *Rural Development* (Susanti, 2017). Berbeda dengan lembaga pembangunan internasional lain yang berdasarkan pada teori-teori barat, IsDB mendukung pembangunan pada suatu negara yang berdasarkan prinsip-prinsip islam didalamnya. Dalam mekanisme program MCPS, IsDB tidak memeberikan bunga pada setiap peminjaman yang di gelontorkan lembaga keuangan tersebut. Hal ini lah yang menjadi pembeda IsDB dan juga menjadi keuntungan bagi Indonesia itu sendiri.



Pada mekanisme kerja sama MCPS pertama, IsDB membantu pembangunan di Indonesia dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) tahun 2010-2014. Melalui mekanisme tersebut, IsDB membantu Indonesia dalam 4 dari 12 sektor pembangunan yang tercantum dalam RPJM. Sektor tersebut yakni, sektor pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan pertanian. Sepanjang tahun 2011-2014 terdapat 42 proyek yang telah dilaksanakan dalam untuk mengatasi sejumlah permasalahan pembangunan dari empat sektor tersebut (Susanti, 2017).

Setelah selesai menjalankan kerjasama MCPS I. IsDB dan Indonesia kembali menjalin kerjasama kedua mereka dalam program MCPS II periode 2016-2020 yang diumumkan pada pembukaan Sidang Tahunan Dewa Gubernur IsDB Group ke-41 (Primadhyta S. , 2016). Kerjasama MCPS II kali ini berbeda dengan periode sebelumnya, dimana pada periode ke-II fokus kerjasama yang dijalin yakni mencakup infrastruktur fisik dan sosial, perkembangan industri keuangan yang inklusif, serta pengembangan sektor usaha dan dukungan terhadap integrasi regional (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Melalui kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan IsDB dalam mekanisme MCPS tersebut, Indonesia menerima berbagai skema bantuan yang ditawarkan oleh IsDB. Adapun, skema tersebut mencakup pendanaan pinjaman dana dalam bentuk hibah untuk mendorong proyek-proyek pembangunan fisik dan bantuan dan bantuan berupa pelatihan untuk mendorong pembangunan berbasis sumber daya manusia. Disisi lain, pinjaman yang dikucurkan oleh IsDB umumnya, terdiri dari berbagai bentuk yakni mencakup pinjaman biasa atau ordinary loan, leasing, istisna, serta skema pembiayaan dalam ekspor dan import. Melalui program MCPS, Indonesia setidaknya dapat mencapai target tertentu untuk menuntaskan masalah pembangunan yang mereka hadapi dan mengarahkan sektor-sektor tersebut menuju arah yang lebih baik lagi.

## **2. Konsep Pembangunan**

Konsep selanjutnya yang digunakan adalah konsep pembangunan. Menurut Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. dan Prof. Dr. Hanif pembangunan adalah suatu proses perbaikan yang saling berkelanjutan pada suatu masyarakat untuk dapat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara ataupun tolak ukur untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan tersebut pada suatu negara. Namun, tolak ukur atau acuan yang digunakan tidak hanya berdasarkan pendapatan per kapita saja, tetapi mencakup hal yang lebih dari itu. Seperti perbaikan pada distribusi pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, dan memperkecil angka

pengangguran, dan lainnya. Selain itu, menurut Deddy T. Tikson pembangunan khususnya pembangunan nasional dapat diartikan sebagai adanya upaya transformasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang dilakukan secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju ke arah yang lebih ingin dicapai (Nurcholis, 2016). Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan ialah suatu proses untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi dalam berbagai sektor yang ingin dicapai oleh suatu negara.

Saat ini, hampir seluruh negara di dunia negacu pada dokumen pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menurut Emil Salim dalam buku yang berjudul *Pembangunan Berkelanjutan* karya Iwan J Azis, menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan atau yang biasa dikenal sebagai *sustainable development*, merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung dengan berupaya untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam sebuah proses pembangunan (Gishca, 2020). Dokumen SDGs, merupakan bentuk lanjutan dari dokumen pembangunan sebelumnya yakni *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Dokumen SDGs resmi menjadi acuan pembangunan sebagaimana besar negara-negara didunia sejak diadakannya pertemuan tingkat tinggi yang bertepatan di markas PBB pada tahun 2015. Pada pertemuan tersebut terdapat 193 negara anggota PBB termasuk salah satunya Indonesia, menyepakati SDGs sebagai agenda pembangunan dalam rentang waktu 2016-2030. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa fokus pembangunan Indonesia mengacu pada 17 tujuan pembangunan yang terakumulasi dalam dokumen SDGs yang mencakup pemberantasan masalah yang diantaranya seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang layak, infrastruktur dan lainnya (International Conference on Public Health, n.d.).

Berdasarkan pemaparan tersebut, konsep pembangunan digunakan untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan lebih dalam terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia. Melalui kerjasama yang dijalin bersama antara Indonesia dan IsDB dalam program MCPS, Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan beberapa sektor pembangunan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Adapun fokus sektor pembangunan yang terakumulasi dalam MCPS II ialah bidang infrastruktur fisik dan program sosial, pengembangan keuangan Syariah, serta pengembangan dalam sektor usaha dan integrasi regional.

Dalam praktiknya Indonesia menerima pembiayaan yang telah disediakan oleh IsDB untuk mendorong sektor-sektor pembangunan di Indonesia. Seperti pada sektor infrastruktur, Indonesia menerima pembiayaan dana sebesar 300 juta dollar AS dari IsDB untuk mendukung terealisasinya perluasan jaringan pembangkit listrik di Indonesia. Selain itu, dalam bidang sosial yang berfokus pada permasalahan terkait sosial, Indonesia menerima pembiayaan dana telah disediakan oleh IsDB sebesar 176,5 juta dolar AS dan 329,76 juta dollar AS yang diberikan kepada empat lembaga pendidikan tinggi di Indonesia serta untuk penanganan permasalahan terkait pemukiman kumuh (Budiawati, 2016).

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran, maka jawaban sementara yang menjawab rumusan masalah terkait strategi yang dibangun melalui kerjasama Indonesia dan IsDB untuk mengoptimalkan sektor pembangunan di Indonesia pada tahun 2016-2020 ialah sebagai berikut:

Strategi ataupun cara yang digunakan yakni dengan melaksanakan kerjasama bilateral program *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) ke-II tahun 2016-2020. Melalui MCPS, IsDB memberikan pinjaman dana untuk mendorong beberapa sektor pembangunan di Indonesia. Sektor-sektor yang didukung juga menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJM). Sektor-sektor tersebut yakni mencakup pembangunan dalam tiga bidang sebagai berikut:

1. Infrastruktur fisik dan program sosial, yang mengacu pada permasalahan pembangunan dalam sosial berbasis masyarakat seperti pendidikan dan infrastruktur fisik seperti sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh masyarakat
2. Perkembangan industri keuangan yang inklusif
3. Pengembangan sektor usaha dan dukungan terhadap integrasi regional

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berikut arah dan sasaran yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Membahas Kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan *Islamic Development Bank* (IsDB) melalui mekanisme *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) II Tahun 2016-2020.
2. Menjawab pokok permasalahan pada bagian rumusan masalah dan menguji hipotesa yang diajukan oleh penulis

3. Mengaplikasikan konsep maupun teori yang selama ini telah diperoleh selama berlangsungnya masa perkuliahan, agar penulis dapat mendeskripsikan permasalahan yang diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Menurut John W Cresswell, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipakai untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia dan sosial. Penelitian kualitatif digunakan untuk memberitahukan hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan pada pandangan data serta analisa data yang ditemukan di lapangan, data tersebut kemudian akan digambarkan dalam laporan penelitian secara terperinci (Creswell, 2013). Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk medeskripsikan permasalahan yang diangkat melalui penelusuran studi pustaka atau literatur serta mengumpulkan data-data dari penelitian serupa sebelumnya sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Penggunaan data sekunder akan diaplikasikan dalam penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud ialah data-data yang disajikan dalam berbagai media situs internet seperti halaman-halaman resmi milik pemerintah Indonesia atau milik IsDB sebagai organisasi Internasional. Serta berbagai halaman pada koran elektronik dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan penelitian fokus dan tidak melebar dari tema yang disajikan, maka penulis akan menetapkan jangkauan penelitian kepada kerjasama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dan IsDB. Penulis akan mengarahkan pembahasan penelitian terhadap strategi kerjasama Indonesia dan IsDB dalam mengoptimalkan sektor pembangunan di Indonesia dengan menjalin kerjasama dalam *Member Country Partnership Strategy (MCPS)* tahun 2016-2020. Adapun penulis juga akan menetapkan jangkauan penelitian untuk data-data yang akan diambil agar penelitian ini tidak terlalu melebar. Data yang diambil akan dimulai dari tahun 2016 sejak disepakatinya kerjasama MCPS II hingga tahun 2020 pada akhir masa kerjasama MCPS II. Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya penulis akan mengambil dan menggunakan data-data diluar dari jangkauan penelitian sebagai bahan referensi ataupun catatan saja.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup empat bab pembahasan yang dijabarkan sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan beberapa komponen yakni, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Bab ini akan berisi uraian tentang potensi yang dimiliki oleh Indonesia dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia.

**BAB III:** Bab ini akan berisi deskripsi dan peran *Islamic Development Bank* (IsDB) sebagai suatu lembaga keuangan multilateral yang menangani permasalahan, yang berkaitan dengan isu pembangunan pada negara-negara anggotanya salah satunya yakni Indonesia

**Bab IV:** Bab ini akan memaparkan tentang strategi kerjasama Indonesia dan IsDB dalam mengoptimalkan sektor pembangunan di Indonesia tahun 2016-2020.

**BAB V:** Bab ini merupakan kesimpulan dan inti dari pembahasan seluruh bab sebelumnya.